

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem informasi berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah atau perusahaan, hal ini ditujukan untuk memperlancar operasional kerja. Berkembangnya teknologi informasi memiliki peranan sangat penting dalam menjadwalkan aktivitas manusia, baik dalam dunia sosial maupun dunia pekerjaan (Handayani, 2012: 6).

Seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi komputer dan informasi, sistem informasi akuntansi konvensional telah berkembang menjadi sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer. Sistem Informasi Akuntansi yang berbasis komputer memungkinkan pemakai laporan keuangan dapat melihat laporan keuangan setiap saat dan menyajikannya lebih cepat dan akurat mengenai informasi keuangan. Informasi keuangan sangat penting bagi perusahaan/lembaga untuk melakukan riset mengenai informasi yang disajikan, dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode yang sebelumnya. Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan

keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat atau periode tertentu (Kasmir, 2013: 220).

Pembuatan sistem informasi akuntansi dimulai dari analisis dan pengamatan terhadap sistem perusahaan. Kemudian dari data yang ada, dilakukan perancangan sistem informasi akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Proses dalam akuntansi secara manual dan berbasis komputer tidak jauh beda, yang membedakan dalam Sistem Informasi berbasis komputer dapat dilakukan dengan sekali *entry (input)* data atau transaksi saja, hal ini dalam buku besar akan berubah dan secara langsung dapat merubah Laporan Keuangan juga (Handoyo, 2004).

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan atau instansi lain untuk mencapai akuntabilitas laporan keuangan. Menurut Hastuti (2005) dalam Prasinta (2012), menyatakan bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan. Suatu perusahaan dengan manajemen yang menerapkan sistem pengelolaan yang baik akan memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada para stakeholdersnya. Oleh karena

itu, manajemen berkewajiban memberikan informasi akurat tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Akuntabilitas laporan keuangan merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik, demokratis, amanah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum (Renyowijoyo, 2008: 65). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo khususnya pada bagian keuangan dituntut dapat memberikan pelayanan administrasi keuangan kepada seluruh satuan sekretariat dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo. Apabila hal ini dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan dukungan terhadap penyajian laporan keuangan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo merupakan pelaksana Pemilu di wilayah Kota Gorontalo. Sebagai penyelenggara Pemilu di Kota Gorontalo, KPU Kota Gorontalo terbentuk berdasarkan pada: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, KEPRES Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Komisi Pemilihan Umum, dan KEPRES Nomor 67 Tahun 2001 tentang Perubahan KEPRES Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000.

Berdasarkan peraturan KPU nomor 22 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja KPU Kota Gorontalo terdiri dari biro perencanaan dan data, biro keuangan, biro hukum, biro umum, biro sumber daya manusia, biro teknis dan hubungan partisipasi masyarakat, biro logistik dan inspektorat (Laporan, 2012: 48). Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, segala kegiatan akuntansi telah menggunakan sistem berbasis komputer.

Dengan bantuan Komputer semua pekerjaan menyangkut laporan keuangan akan lebih mudah dan dapat terselesaikan tepat waktu, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silviana (2013) dengan judul Hubungan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada 9 Kota Di Provinsi Jawa Barat). Hasil penelitian menunjukkan, nilai koefisien korelasi sebesar 0.686, dan nilai koefisien determinasi sebesar 47.10%. Belum maksimalnya kontribusi sistem informasi akuntansi dalam menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya disebabkan oleh: masih ada entitas yang terlambat menyerahkan laporan

keuangan sistem informasi akuntansi dan pelaporan masih ada yang belum memadai; sistem informasi akuntansi dan pelaporan masih ada yang belum didukung Sumber Daya Manusia yang memadai, sehingga disarankan agar pemerintah daerah khususnya pemerintah kota untuk dapat lebih meningkatkan lagi hal-hal yang masih belum memadai tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sastrawan, (2012: 17) dengan judul Perbandingan Penerapan Sistem Akuntansi Konvensional Dengan Sistem Akuntansi Berbasis Komputer Pada Perusahaan Dagang menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis komputer yang dijalankan pada PD. Cimanggu Jaya sudah terbentuk fungsi-fungsi terkait yang terpisah seperti fungsi kas dipisah dengan fungsi akuntansi, semua transaksi direkam dalam bukti atau dokumen transaksi bernomor urut tercetak serta sudah dilakukan pencatatan jurnal sampai menghasilkan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi komputer *Microsoft Office Excel*. Penghitungan fisik persediaan juga selalu dilakukan tiap bulannya sehingga unsur pengendalian internnya sudah cukup baik.

Semua pekerjaan menyangkut pembuatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan akan lebih mudah dan dapat terselesaikan tepat waktu jika menggunakan sistem yang telah berbasis komputer. Namun hal ini berbeda dengan fenomena yang ada di kantor KPU Kota Gorontalo. Operator sistem bagian keuangan KPU belum menguasai SIA, sering terjadi kesalahan dalam pengimputan data laporan keuangan,

bahkan data laporan keuangan yang dikirim tidak sesuai dengan data yang diterima pada saat melakukan rekonsiliasi di KPPN Kota Gorontalo.

Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan Aviana, (2012: 8) dengan judul penerapan pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi berbasis komputer menyimpulkan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi, tidak lepas dari risiko-risiko yang ada baik kesalahan yang disengaja seperti penipuan, tindak kebohongan untuk mendapatkan keuntungan dan tidak disengaja seperti salah memasukan nama atau kode pelanggan. Keterbatasan dalam penggunaan sistem informasi akuntansi seringkali terjadi kesalahan dalam pengimputan data laporan keuangan. Untuk itu, dengan melihat latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meelakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Penyajian Laporan Keuangan (pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Operator sistem bagian keuangan KPU Kota Gorontalo belum menguasai SIA.
2. Sering terjadi kesalahan dalam pengimputan data laporan keuangan.

3. Data Laporan keuangan yang dikirim tidak sesuai dengan data yang diterima pada saat melakukan rekonsiliasi di KPPN Kota Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi di KPU Kota Gorontalo?
2. Bagaimana penyajian laporan keuangan di KPU Kota Gorontalo?
3. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap penyajian laporan Keuangan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi di Kantor Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
2. Untuk melihat sejauh mana penyajian laporan keuangan di Kantor Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap penyajian laporan keuangan di Kantor Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan khususnya di bidang akuntansi dan keuangan pemerintah serta sebagai bahan referensi dan data bagi peneliti-peneliti yang tertarik pada kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dalam proses penyusunan laporan keuangan serta memberikan pemahan yang baru dan lebih mendalam tentang pentingnya penerapan teknologi sistem informasi akuntansi yang sangat mempengaruhi penyajian laporan keuangan.